

TESIS

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBATALAN HIBAH WASIAT
TERHADAP SENGKETA WARIS**

(Studi Perkara Nomor 944/Pdt.G/2017/PA.Stb)

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar

Magister Kenotariatan



Di susun oleh:

AFIF FAKHRI

1820123047

Dosen Pembimbing

- 1. Dr. Mardenis, SH., M.Si**
- 2. Dr. M. Hasbi, SH., MH**

MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2020

PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PEMBATALAN HIBAH WASIAT TERHADAP SENGGKETA WARIS

(Studi Perkara Nomor 944/Pdt.G/2017/PA.Stb)

**Afif Fakhri, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas
Andalas, 103 halaman, Tesis, 2020**

ABSTRAK

Masalah waris baru muncul manakala ada orang yang meninggal dunia, oleh karena itu seseorang yang masih hidup tidak boleh membagikan hartanya kepada ahli warisnya (anak, suami/istri, orang tuanya) dengan dasar warisan, Dalam hukum kewarisan Islam, tidak dikenal konsep penunjukkan atau pengangkatan ahli waris, yang ada hanya pemberian dari seseorang kepada orang lain yang berlaku apabila yang memberikan meninggal dunia. Pemberian dalam keadaan khusus seperti ini dikenal dengan nama wasiat. Maka wasiat diatur dalam Pasal 195 ayat 1, 2 dan 3 KHI, yaitu Ayat 1 Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi atau tertulis dihadapan dua orang saksi atau dihadapan Notaris, Ayat 2 Wasiat hanya dibolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris mengetahuinya, Ayat 3 Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini (1) Bagaimanakah pengaturan hukum hibah wasiat dalam perkara sengketa waris menurut Kompilasi Hukum Islam?(2) Mengapa terjadi pembatalan hibah wasiat berdasarkan putusan nomor 944/Pdt.G/2017/PA.Stb?(3) Bagaimana pertimbangan hakim terhadap pembatalan hibah wasiat dalam sengketa waris berkaitan dengan putusan nomor 944/Pdt.g/2017/PA.Stb?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, hasil penelitian yang diperoleh adalah (1) Pengaturan hukum hibah wasiat diatur pasal 194 sampai 209 dimana ketentuan wasiat yang diatur didalamnya menyangkut hak untuk berwasiat, jenis-jenis wasiat, pencabutan wasiat dan batalnya wasiat dan hal yang tidak dibolehkan dalam wasiat, sedangkan hibah diatur dalam pasal 210 sampai 214 yang memuat ketentuan-ketentuan mengenai hibah. Dimana penyelesaian sengketa waris islam diselesaikan diperadilan agama. (2) Pembatalan hibah wasiat berdasarkan putusan nomor 944/Pdt.G/2017/PA.Stb tidak terpenuhinya syarat-syarat hibah wasiat hingga terjadi pembatalan atas hibah wasiat tersebut (3) berdasarkan pertimbangan fakta dan pertimbangan hukum yang ditemukan selama dipersidangan, dimana bukti tertulis dan bukti saksi terlihat jelas bahwa akta hibah wasiat didalam perkara diatas terbukti cacat formil dan tidak berkekuatan hukum, sehingga bukti akta hibah wasiat tersebut tidak memiliki nilai pembuktian dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Kata kunci: Hibah Wasiat, Waris, Pertimbangan Hakim

THE JUDGE'S CONSIDERATIONS AGAINST CANCELLATION OF ADMINISTRATIVE GRANT TOWARDS HERITAGE DISPUTES

(Case Study Number 944 / Pdt.G / 2017 / PA.Stb)

Afif Fakhri, Notary Megister Program, Faculty of Law, Andalas University, 103 pages, Thesis, 2020

ABSTRACT

A new inheritance problem arises when someone dies, therefore a person who is still alive cannot share his assets with his heirs (children, husband / wife, parents) on the basis of inheritance. In Islamic inheritance law, the concept of appointment or appointment is not known. heir. There is only a gift from one person to another that is valid if the one who gave died. Giving under special circumstances like this is known as a will. Then the will is set in Article 195 paragraphs 1, 2 and 3 KHI, namely Paragraph 1 Testament is carried out orally in front of two witnesses or written before two witnesses or before a Notary Public, Paragraph 2 Will is only allowed as much as one third of the inheritance unless all heirs know it, Paragraph 3 A will to an heir is only valid if it is approved by all heirs. The problems discussed in this thesis are (1) How is the legal arrangement for wills in inheritance disputes according to the Islamic Law Compilation? (2) Why can a will cancellation based on decision number 944 / Pdt.G / 2017 / PA.Stb? (3) How? Judge's consideration of cancellation of wills in inheritance disputes in connection with the decision number 944 / Pdt.g / 2017 / PA.Stb ?. The method used in this research is normative research, the results of the research obtained are (1) The legal arrangements for wills are regulated in articles 194 to 209 where the provisions of wills that are regulated therein concern the right to testament, types of wills, cancellation of wills and wills and matters is not allowed in a will, while the grant is regulated in articles 210 to 214 which contain provisions regarding the grant. Where the settlement of Islamic inheritance disputes is resolved in a religious court. (2) Cancellation of a will based on decision number 944 / Pdt.G / 2017 / PA.Stb does not fulfill the conditions of a will grant until the will cancellation of the will (3) based on considerations of facts and legal considerations found during the trial, where written evidence and witness evidence are clear that the will prove deed in the above case is proven to be formally flawed and has no legal force, so that the proof of the will have no evidentiary value and has no legal force. Binding.

Keywords: *Will Grants, Inheritance, Judge's Consideration*